

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Diplomasi ekonomi dan studi hubungan internasional adalah satu kesatuan yang saling berkaitan satu sama lain. Diplomasi ekonomi sendiri merupakan usaha sebuah negara untuk membuat suatu keputusan dalam negeri ataupun luar negeri yang mampu menguntungkan kedua belah pihak di dalam kerjasama khususnya terkait sektor perekonomian (Bayne & Woolcock, 2016). Secara garis besar di dalam studi hubungan internasional diplomasi ekonomi terutama melalui upaya negosiasi dapat digunakan untuk mengatasi berbagai macam permasalahan khususnya di dalam perdagangan secara bilateral dan multilateral. Permasalahan yang seringkali hadir di dalam perdagangan secara bilateral dan multilateral seperti hambatan tarif, menurunnya jumlah kuantitas ekspor, ketimpangan antara jumlah kuantitas ekspor dan impor serta menurunnya jumlah nilai ekspor dan impor terhadap sebuah komoditas. Disisi lain, diplomasi ekonomi dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk meningkatkan aktivitas perdagangan di antara dua negara atau lebih yang terlibat di dalam sebuah perjanjian perdagangan. Dalam prakteknya diplomasi ekonomi dapat dilakukan oleh berbagai aktor seperti aktor negara, aktor non negara dan aktor perusahaan. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa diplomasi ekonomi cenderung bersifat fleksibel dan kompleks. Oleh karena itu, diplomasi ekonomi di sini dapat dilakukan untuk mempererat maupun meningkatkan aktivitas perdagangan antara Indonesia dengan beberapa negara mitra khususnya dengan negara India.

Pada dasarnya India merupakan negara mitra strategis Indonesia dalam hubungan perdagangan bilateral sejak ribuan tahun silam, namun untuk kerjasama perdagangan secara resmi ditandai dengan adanya kerjasama untuk menciptakan perdamaian dunia dan kesejahteraan ekonomi pada tanggal 23 Maret 1947 sampai 2 April 1947. Kemudian, kerjasama perdagangan bilateral semakin berjalan secara signifikan pasca ditandatanganinya *Memorandum of Understanding on Agricultural Cooperation (MOU)* oleh Dr. Syarifuddin Baharsyah selaku Menteri Muda Pertanian

Indonesia dan H.E. Mr. Rama Chandra selaku Minister of State in the Minister of Agriculture India pada 20 Februari 1992. Di dalam tahun yang sama Indonesia dan India mulai menyepakati adanya upaya peningkatan kerjasama di bidang pertanian khususnya terkait perdagangan komoditas minyak kelapa sawit atau *crude palm oil* (CPO). Skema perdagangan antara Indonesia dengan India mulai ditetapkan berdasarkan skema perdagangan di dalam perjanjian ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA). Pada dasarnya AIFTA merupakan perjanjian perdagangan lintas kawasan antara sepuluh negara ASEAN dengan India atau seringkali disebut sebagai perjanjian ASEAN+1. Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan perdagangan dalam bentuk barang ataupun jasa di antara kedua kawasan.

Perjanjian AIFTA telah melalui proses perundingan yang cukup panjang dan dapat disetujui oleh semua pihak pada 28 Agustus 2008 khususnya melalui AEM-India Consultation keenam yang diadakan di Singapura. Kemudian, perjanjian tersebut ditandatangani pada 13 Agustus 2009 di dalam Pertemuan ke-14 Tingkat Menteri Ekonomi ASEAN di Bangkok, Thailand. Di dalam perjanjian AIFTA disebutkan bahwa produk barang akan dikelompokkan menjadi dua kategori seperti *Normal Track (NT)* dan *Sensitive Track (TS)* (Octaviani, 2014). Kategori *Normal Track* merupakan produk yang dapat dipercepat penghapusan ataupun penurunan tarif bea masuknya dalam rangka meningkatkan volume perdagangan antar negara, sedangkan kategori *Sensitive Track* merupakan produk yang dianggap sensitif sehingga dapat diturunkan tarif bea masuknya, namun dengan pola yang lebih lambat daripada pola yang dimiliki oleh produk dengan kategori *Normal Track*. Perjanjian ini mulai diberlakukan oleh semua pihak sejak 1 Januari 2010. Kemudian, perjanjian AIFTA mulai diperluas dengan diberlakukannya The ASEAN-India in Services Agreement dan The ASEAN-India Investment Agreement pada November 2014.

Berdasarkan perkembangan sejarah perdagangan antara Indonesia dengan India tersebut dapat terlihat bagaimana Indonesia berusaha untuk mempromosikan hubungan perdagangan di sektor agrikultur khususnya terkait komoditas minyak kelapa sawit. Hal ini dikarenakan minyak kelapa sawit merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia terkait perdagangan dengan berbagai negara

mitra khususnya India. Hal ini dibuktikan pada tahun 2019 India merupakan salah satu negara mitra dagang terbesar Indonesia serta sekaligus menjadi salah satu negara tujuan terbesar terkait ekspor kelapa sawit selain China dan Uni Eropa. Pada tahun 2019 produksi minyak kelapa sawit Indonesia telah berkontribusi terhadap lebih dari 50% produksi global (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2019). Di sisi lain, pada tahun 2019 total nilai ekspor minyak kelapa sawit dan berbagai produk turunan kelapa sawit telah mencapai angka 60% (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2021).

Dapat dikatakan bahwa India merupakan pasar yang sangat potensial bagi komoditas CPO asal Indonesia. Hal ini dikarenakan minyak kelapa sawit merupakan salah satu komoditas impor utama India terkait perdagangan dengan berbagai negara mitra khususnya Indonesia. Minyak kelapa sawit merupakan bahan baku penting untuk berbagai industri di India seperti pada industri makanan, kosmetik, sabun, hand sanitizer, konstruksi dan *renewable energy* (biodiesel). Selain itu, India merupakan negara peringkat pertama setelah China dan Eropa sebagai negara dengan permintaan CPO terbanyak di dunia untuk periode 2019-2020. Hal ini berdasarkan hasil proyeksi yang dilakukan oleh CPOPC pada tahun 2020, dimana permintaan CPO India pada periode 2019-2020 (sampai dengan oktober) mencapai sekitar 8,3 juta ton (Council of Palm Oil Producing Countries, 2020). Di sisi lain, konsumsi minyak nabati di India juga cenderung meningkat untuk periode 2017-2020. Tercatat pada tahun 2017 konsumsi minyak nabati di India sebesar 21,68 juta ton dan pada tahun 2020 meningkat sebesar 0,51 juta ton menjadi 22,19 juta ton (Statista, 2021).

Di sisi lain, walaupun jumlah konsumsi minyak nabati di India pada periode 2017-2020 cenderung mengalami peningkatan, namun jika dilihat dari perkembangan jumlah dan nilai ekspor CPO asal Indonesia ke India sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 cenderung mengalami penurunan. Hal ini diikuti seiring terjadinya perubahan kebijakan tarif masuk CPO yang diberlakukan oleh Pemerintah India. Berikut merupakan data terkait kebijakan tarif masuk CPO ke India sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 :

Tabel 1 Perbandingan Tarif Masuk CPO di India

Tarif Masuk	2017			2018	2019	2020	
	Januari	Agustus	November	Maret	Maret	Januari	November
CPO	7,5%	15%	30%	44%	40%	37,5%	27,5%
Produk Olahan	15%	25%	40%	54%	50%	45%	37,5%

Sumber : Department of Food & Public Distribution, 2020

Secara garis besar berdasarkan Gambar 1 dapat dijelaskan bahwa kebijakan tarif masuk CPO ke India sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 cenderung bersifat dinamis. Dimana dapat terlihat kebijakan tarif terkait komoditas CPO untuk periode 2017-2020 bahwa pada bulan Januari 2017 pemerintah India menetapkan tarif masuk CPO terendah yaitu sebesar 7,5% dan pada bulan Maret 2018 pemerintah India menetapkan tarif masuk CPO tertinggi yaitu sebesar 44%. Selain itu, kebijakan tarif masuk produk olahan juga cenderung bersifat dinamis. Dimana pada bulan Januari 2017 pemerintah India telah menetapkan tarif masuk produk olahan terendah yaitu sebesar 15% dan pada bulan Maret 2018 pemerintah India menetapkan kebijakan tarif masuk produk olahan tertinggi yaitu sebesar 54%. Sehingga dapat dilihat bahwa pada periode 2017-2018 tarif masuk CPO ke India cenderung meningkat, namun pada periode 2019-2020 tarif masuk CPO ke India cenderung menurun. Perubahan tarif masuk CPO yang terjadi telah menjadi hambatan perdagangan Indonesia-India (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2020).

Perubahan tarif tersebut juga diikuti dengan menurunnya jumlah kuantitas ekspor CPO Indonesia ke India. Hal ini dibuktikan berdasarkan data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia terkait jumlah kuantitas ekspor CPO Indonesia ke India periode 2017-2020 bahwa pada tahun 2017 jumlah kuantitas ekspor CPO Indonesia ke India sebesar 7,325 ton dan menurun sebesar 2,757 ton pada tahun 2020 menjadi 4,568 ton (Badan Pusat Statistik, 2021). Ketika jumlah kuantitas ekspor CPO Indonesia ke India cenderung mengalami penurunan, maka akan secara langsung

diikuti dengan cenderung menurunnya jumlah nilai ekspor CPO Indonesia ke India. Hal ini dibuktikan berdasarkan data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia terkait jumlah nilai ekspor CPO Indonesia ke India untuk periode 2017-2020 bahwa pada tahun 2017 jumlah nilai ekspor CPO Indonesia ke India sebesar 4,901 juta USD dan menurun sebesar 1,914 juta USD pada tahun 2020 menjadi 2,987 juta USD (Badan Pusat Statistik, 2021).

Di sisi lain, walaupun pada tahun 2018 pemerintah India menetapkan tarif masuk tertinggi untuk CPO beserta produk olahannya, namun jumlah kuantitas dan nilai ekspornya pada tahun 2018 bukan merupakan jumlah terendah untuk periode 2017-2020. Hal ini dibuktikan ketika pada tahun 2018 pemerintah India menetapkan tarif masuk CPO sebesar 44% serta produk olahannya sebesar 54%, namun jumlah kuantitas ekspor CPO Indonesia ke India sebesar 6,346 ton dengan nilai ekspor sebesar 3,561 juta USD. Jumlah kuantitas ekspor terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 4,568 ton dan nilai ekspor terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 2,252 juta USD (Badan Pusat Statistik, 2021). Pada dasarnya perubahan kebijakan terkait tarif masuk CPO di India dipengaruhi oleh adanya kebijakan *Make In India* yang dicetuskan oleh Narendra Modi sejak tahun 2014. Kebijakan *Make In India* merupakan kebijakan yang bertujuan untuk menguatkan beragam sektor seperti pertanian dan sumber daya di India dengan menggunakan berbagai jenis pajak salah satunya menggunakan tarif masuk CPO sebagai sumber pendanaan. Di sisi lain, Pemerintah India juga berusaha untuk meminimalisir kesenjangan tarif masuk antara CPO dengan minyak nabati lainnya seperti minyak bunga matahari serta minyak kedelai yang dimana sebagian besar diimpor dari Argentina, Brazil, Rusia dan Ukraina. Selain itu, walaupun sudah terdapat prinsip kesetaraan (*level playing field*) di dalam perdagangan internasional, namun pada Januari 2019 India sempat menurunkan tarif masuk minyak kelapa sawit menjadi 40% dan untuk tarif masuk produk olahan sawit asal Malaysia hanya dikenakan tarif sebesar 45%.

Sebenarnya pasca diterbitkannya kebijakan *Make In India* sejak tahun 2014 dan sebelum tarif masuk CPO mengalami peningkatan pada Agustus 2017 pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya diplomasi ekonomi dengan

pemerintah India dalam rangka meningkatkan hubungan perdagangan bilateral. Beberapa upaya diplomasi tersebut, antara lain; pertama, upaya diplomasi ekonomi pada tahun 2015 dilakukan melalui sela-sela pertemuan Indian-Ocean Rim Association (IORA) di Padang, Sumatera Barat khususnya pada 23 Oktober 2015 yang dimana Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri Republik Indonesia melakukan pertemuan dengan Vijay Kumar Singh selaku Menteri Negara Urusan Luar Negeri India. Kemudian, melalui pertemuan antara Jusuf Kalla selaku Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Mohammad Hamid Ansari selaku Wakil Presiden India pada 2 November 2015 di Istana Wakil Presiden, Jakarta.

Kedua, upaya diplomasi ekonomi pada tahun 2016 dilakukan melalui pertemuan bilateral pada 5 April 2016 di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia. Pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, A.M. Fachir selaku Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan para anggota Indonesia-India Eminent Persons Group (II-EPG) serta membahas terkait kemitraan ekonomi komprehensif di antara kedua negara sebagai salah satu isu pokok dari *Vision for 2025*. Ketiga, upaya diplomasi dilakukan pada 5-7 Maret 2017 melalui pertemuan tingkat menteri pada Konferensi Tingkat Tinggi IORA di Jakarta Convention Center, Indonesia yang salah satunya membahas terkait kerjasama perdagangan dan investasi. Walaupun beberapa upaya diplomasi ekonomi tersebut telah dilakukan, India tetap meningkatkan tarif masuk CPO sejak Agustus 2017. Melihat kondisi tersebut maka diperlukannya analisis terkait upaya diplomasi ekonomi Indonesia terhadap India dalam menyikapi ketidakpastian kebijakan tarif masuk CPO periode 2017-2020.

Sehubungan dengan literatur yang membahas mengenai upaya diplomasi ekonomi Indonesia terkait komoditas CPO, Yahya (2019) melihat upaya diplomasi ekonomi Indonesia dalam rangka mempertahankan komoditas CPO asal Indonesia di pasar India pada periode 2010-2015 yang dilakukan dengan mengoptimalkan beberapa instrumen kebijakan seperti CPO Supporting Fund (CSF), Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) Chennai, dan Palm Oil Industrial Cluster (POIC). Hal

tersebut dilakukan mengingat terjadinya peningkatan permintaan India untuk CPO asal Malaysia dan pengembangan industri CPO di India. Sehingga Yahya (2019) lebih menekankan kepada upaya diplomasi dengan menggunakan instrumen kebijakan yang sudah terbentuk sebelumnya daripada menciptakan rancangan terkait instrumen kebijakan baru. Kemudian, menurut Utama (2020) dijelaskan bahwa dalam mempertahankan komoditas CPO asal Indonesia di pasar India perlu dilakukan upaya diplomasi melalui kerjasama perdagangan yang mengikat di antara kedua negara khususnya melalui ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA). ASEAN-India Free Trade Area merupakan sebuah kerjasama perdagangan yang terdiri dari sepuluh negara ASEAN dan India. Melalui kerjasama perdagangan ini Indonesia dapat mempertahankan komoditas CPO miliknya di pasar India. Selain mempertahankan pangsa pasar komoditas CPO, Indonesia juga mampu meningkatkan ataupun memperluas pangsa pasar komoditas CPO miliknya di pasar India.

Selanjutnya, jika mengacu kepada karya tulis Bernaz (2019) dijelaskan bahwa diplomasi ekonomi Indonesia terkait CPO tidak hanya dilakukan sebelum kerjasama perdagangan dibentuk, namun juga pasca kerjasama tersebut dibentuk. Hal ini dikarenakan kerjasama perdagangan tidak selalu menjamin bahwa Indonesia akan mampu mempertahankan komoditas CPO miliknya di pasar India seperti yang telah dijelaskan melalui karya tulis (Utama, 2020). Melalui karya tulis Bernaz (2019) menjelaskan bahwa dalam praktek kerjasama perdagangan seringkali terjadi fluktuasi aktivitas perdagangan khususnya terkait komoditas CPO asal Indonesia. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor seperti faktor penghambat dalam meningkatkan kuantitas ekspor CPO Indonesia ke India contohnya perjanjian bilateral antara India dengan Malaysia yang merupakan negara produsen CPO di Kawasan Asia Tenggara selain Indonesia, pengembangan industri kelapa sawit oleh India dan tarif keluar CPO yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia. Sehingga perlu dilakukannya sebuah upaya diplomasi dalam mengatasi beberapa faktor penghambat tersebut.

Walaupun terdapat faktor penghambat dalam meningkatkan kuantitas ekspor CPO Indonesia ke India, namun terdapat beberapa faktor pendukung terkait hal tersebut. Beberapa faktor pendukung tersebut seperti terjadinya peningkatan produksi

CPO Indonesia, upaya promosi perdagangan luar negeri dan faktor cuaca El-Nino. Di sisi lain, jika mengacu kepada karya tulis Ermawati dan Saptia (2013) memandang bahwa diplomasi dalam mendukung peningkatan kualitas dan *branding* terkait CPO asal Indonesia perlu dilakukan. Hal ini dikarenakan eksistensi CPO asal Indonesia di pasar India seringkali dipengaruhi oleh hadirnya CPO asal Malaysia. Pandangan tersebut memiliki kesamaan dengan pandangan terkait faktor pendukung kuantitas ekspor CPO Indonesia ke India yang dijelaskan melalui karya tulis (Bernaz, 2019). Hal ini dikarenakan Malaysia merupakan salah satu negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Pada tahun 2012-2014 Malaysia dikatakan sebagai negara yang memiliki kinerja ekspor tertinggi di dunia dan telah mengalahkan kinerja ekspor minyak kelapa sawit Indonesia.

Selanjutnya, berdasarkan karya tulis Octaviani (2014) dijelaskan bahwa pada periode 2006-2009 upaya diplomasi ekonomi terkait mengamankan komoditas CPO asal Indonesia di pasar India adalah dengan memaksimalkan upaya diplomasi melalui kemitraan *strategic partnership* antara Indonesia dengan India. Hal ini dikarenakan India sebagian besar melakukan impor CPO asal Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan sektor industrinya. Hal ini dibuktikan dimana pada periode tersebut India merupakan negara pengimpor terbesar kedua setelah Uni Eropa terkait komoditas CPO asal Indonesia dengan jumlah rata-rata impor sebesar 2,987 ton, sehingga India menjadi pasar yang sangat potensial bagi komoditas ekspor CPO asal Indonesia. Disisi lain, jika mengacu kepada karya tulis Purba dan Ardiyanti (2021) lebih menekankan kepada upaya diplomasi ekonomi terkait CPO asal Indonesia yang seringkali dipengaruhi oleh bea ekspor CPO Indonesia di dalam perdagangan CPO Indonesia-India. Bea ekspor yang diberlakukan oleh Indonesia tersebut menyebabkan adanya hambatan bagi Indonesia untuk melakukan diplomasi ekonomi dalam rangka mengamankan komoditas CPO miliknya di pasar India. Kemudian, jika mengacu kepada karya tulis Sari dan Dedi Budiman Hakim (2014) lebih menekankan kepada diplomasi ekonomi Indonesia terkait *non-tariff measures* ekspor komoditas CPO Indonesia ke negara tujuan ekspor utama. Hal ini dikarenakan kebijakan non-tarif seringkali menjadi penghambat terkait ekspor komoditas CPO Indonesia ke berbagai

negara. Pada dasarnya kebijakan non-tarif tersebut sering digunakan oleh berbagai negara sebagai bentuk upaya proteksi kepada produsen domestik dalam menghadapi adanya persaingan impor dengan beragam produk asing.

Berdasarkan karya-karya tersebut dapat terlihat bahwa karya tulis Yahya dan Gunawan (2019) serta Octaviani (2014) menjelaskan terkait strategi diplomasi yang harus dilakukan dalam mendukung peningkatan aktivitas ekspor CPO asal Indonesia ke pasar India berserta dengan faktor-faktornya. Kemudian, karya tulis Utama (2020) dan Bernaz (2019) membahas terkait bagaimana upaya diplomasi melalui perjanjian perdagangan Indonesia-India dalam rangka mengamankan komoditas CPO asal Indonesia di pasar India. Setelah itu, karya tulis Ermawati dan Saptia (2013) membahas bagaimana diplomasi dan *branding* terkait peningkatan kualitas kinerja ekspor CPO asal Indonesia ke pasar India. Di sisi lain, karya tulis Purba dan Ardiyanti (2021) lebih menekankan kepada upaya diplomasi ekonomi terkait CPO asal Indonesia di pasar India yang seringkali mengalami hambatan perdagangan CPO Indonesia-India yang disebabkan oleh kebijakan bea ekspor yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia. Sedangkan karya tulis Sari dan Dedi Budiman Hakim (2014) lebih menekankan terkait bagaimana pengaruh hambatan non-tarif berbagai negara terhadap ekspor komoditas CPO Indonesia serta bagaimana upaya diplomasi yang dilakukan. Dengan demikian, karya-karya tersebut belum membahas dari sisi upaya diplomasi ekonomi Indonesia terhadap India dalam menyikapi ketidakpastian kebijakan tarif masuk CPO khususnya pada periode 2017-2020. Hal ini mengingat adanya ketidakpastian tarif masuk yang diberlakukan oleh pemerintah India telah menjadi hambatan tarif bagi perdagangan bilateral antara Indonesia dengan India.

1.2. Rumusan Masalah

Perubahan kebijakan tarif masuk *crude palm oil* (CPO) yang diberlakukan oleh pemerintah India cenderung bersifat dinamis. Tarif masuk CPO serta produk turunannya pada tahun 2017-2018 mengalami peningkatan, namun untuk tahun 2019-2020 mengalami penurunan. Walaupun pada tahun 2017-2018 tarif masuk CPO mengalami peningkatan. namun pada Januari 2017 merupakan periode dengan

penetapan tarif masuk terendah untuk tahun 2017-2020. Hal ini menggambarkan bahwa terjadi ketidakpastian pemberlakuan tarif masuk CPO oleh pemerintah India. Pemberlakuan tarif masuk yang tidak pasti tersebut telah menjadi hambatan tarif dalam perdagangan antara Indonesia dengan India. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia beserta pemangku kepentingan lainnya perlu melakukan diplomasi ekonomi dalam bernegosiasi dengan pemerintah India untuk menciptakan kebijakan tarif yang lebih pasti. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : **Bagaimana upaya diplomasi ekonomi Indonesia terhadap India dalam menyikapi ketidakpastian kebijakan tarif masuk *crude palm oil* (CPO) periode 2017-2020?**

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai bagaimana upaya diplomasi ekonomi Indonesia terhadap India dalam menyikapi ketidakpastian kebijakan tarif masuk CPO periode 2017-2020.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk menjadi bahan evaluasi bagi berbagai pihak terkait bagaimana upaya diplomasi ekonomi Indonesia terhadap India dalam menyikapi ketidakpastian kebijakan tarif masuk CPO periode 2017-2020.

1.4.2. Manfaat Akademis

Penelitian ini bermanfaat untuk menjadi salah satu contoh mengenai bagaimana peran diplomasi ekonomi di dalam studi hubungan internasional khususnya terkait upaya penyelesaian hambatan tarif di dalam perdagangan secara bilateral.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I Pendahuluan berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian yang terdiri dari tujuan praktis dan tujuan teoritis, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat praktis dan manfaat akademis terkait studi kasus diplomasi ekonomi Indonesia terhadap India dalam menyikapi ketidakpastian kebijakan tarif masuk CPO periode 2017-2020.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II Tinjauan Pustaka berisi penjelasan mengenai konsep dan teori penelitian serta kerangka pemikiran yang mendukung analisis terkait studi kasus diplomasi ekonomi Indonesia terhadap India dalam menyikapi ketidakpastian kebijakan tarif masuk CPO periode 2017-2020.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada BAB III Metode Penelitian berisi penjelasan mengenai objek penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, dan tabel rencana waktu yang digunakan untuk mendukung analisis terkait studi kasus diplomasi ekonomi Indonesia terhadap India dalam menyikapi ketidakpastian kebijakan tarif masuk CPO periode 2017-2020.

BAB IV DINAMIKA PERDAGANGAN CPO INDONESIA TERHADAP INDIA DI TENGAH KETIDAKPASTIAN KEBIJAKAN TARIF MASUK CPO

Pada BAB IV berisi penjelasan mengenai India sebagai pasar potensial CPO asal Indonesia, dinamika ekspor komoditas CPO asal Indonesia ke India pada periode 2017-2020, ketidakpastian tarif masuk CPO di India, dan tanggapan perusahaan kelapa sawit Indonesia terhadap ketidakpastian kebijakan tarif masuk yang diberlakukan India.

BAB V DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DALAM MENYIKAPI KETIDAKPASTIAN KEBIJAKAN TARIF MASUK CPO DI INDIA

Pada BAB V berisi mengenai diskusi dan analisis data yang dapat menjelaskan terkait diplomasi ekonomi Indonesia terhadap India dalam menyikapi ketidakpastian kebijakan tarif masuk CPO periode 2017-2020 beserta tantangannya.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Pada BAB VI berisi mengenai kesimpulan serta saran yang terdiri dari saran praktis dan saran metodologis terkait studi kasus diplomasi ekonomi Indonesia terhadap India dalam menyikapi ketidakpastian kebijakan tarif masuk CPO periode 2017-2020.